

Analisis Pengelolaan Perhutanan Sosial di Sarolangun Provinsi Jambi

Doni Satria¹, Hutwan Syarifuddin¹, Marwoto¹

¹Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi : e-mail: donisatria0101@gmail.com

Abstract

Kegiatan pengelolaan hutan terdiri dari perencanaan, perlindungan, pemanfaatan dan Evaluasi. Perhutanan sosial merupakan program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Rumusan dalam penelitian ini adalah menganalisis kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan pengelolaan hutan. Penelitian ini dengan bentuk deskriptif kuantitatif teknik sampling secara purposive sejumlah 83 sampel responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemanfaatan hutan memiliki partisipasi yang paling tinggi dan kegiatan evaluasi menunjukkan partisipasi yang paling rendah. Tingkat partisipasi masyarakat diperoleh dengan kategori sangat tinggi 22 %, tinggi, 26%, cukup 19%, rendah 14% dan sangat rendah 2%.

Kata kunci : Ekologi, Pengelolaan Hutan

PENDAHULUAN

Pokok permasalahan kawasan di KPHP Limau Unit VII-Hulu Sarolangun adalah pengelolaan hutan belum maksimal, kebutuhan lahan yang disebabkan kurangnya lahan garapan dan kebutuhan kayu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga mengakibatkan terjadinya praktek *illegal logging* dan perambahan hutan di hampir seluruh kawasan hutan terutama yang sangat berdekatan dengan perkampungan penduduk dan kebun garapan masyarakat, disamping itu perambahan dan perladangan oleh masyarakat, lebih didorong oleh motif ekonomi dan penguasaan atas sumber daya lahan. Korelasi permasalahannya adalah kemiskinan masyarakat sekitar kawasan hutan. Hal ini berhubungan dengan persoalan akses yang terbatas, terutama dalam hal memperoleh sumber penghasilan.

Sebagian besar masyarakat disekitar Kawasan hutan telah diberikan akses Perhutanan Sosial diantaranya adalah skema Hutan Adat, Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan. Melalui Perhutanan Sosial masyarakat diberikan hak dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi hutan, untuk meningkatkan kesejateraan.

Salah satu usaha untuk meningkatkan efektivitas implementasi KPH adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan KPH mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada penilaian implemementasi KPH, hal ini sejalan dengan dengan teori

Daniel Mazmanian dan Paul Sabartier (1983) disampakain oleh Agustino, (2006) yang mengemukakan bahwa salah satu faktor penting yang mampu meningkatkan efektivitas implementasi sebuah kebijakan publik adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam serutuh tahapan implementasi kebijakan publik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data primer, sekunder yang bersumber dari kuisisioner, wawancara, jurnal dan dokumen lain yang sesuai. Data yang digunakan adalah data dari Hutan Desa, Hutan Adat dan Hutan Kemasyarakatan. Jumlah responden ditentukan secara purposive yaitu sejumlah 83 responden. Data yang diperoleh dilakukan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skoring Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial di analisis dengan teknik analisis kualitatif. Skala pengukuran yang digunakan pada variabel partisipasi masyarakat yaitu skala ordinal. tingkatan partisipasi masyarakat di ukur menggunakan beberapa tingkatan kelas sebagai berikut :

- Selalu : bobot 5
- Sering: bobot 4
- Kadang-kadang: bobot 3
- Jarang: bobot 2
- Tidak pernah: bobot 1

Untuk menentukan nilai dalam tingkat partisipasi masyarakat digunakan rumus sebagai berikut :

- Nilai terendah = skor terendah x jumlah pertanyaan
Maka : nilai terendah = $1 \times 20 = 20$
- Nilai tertinggi = skor tertinggi x jumlah pertanyaan
Maka : nilai tertinggi = $5 \times 20 = 100$

Maka didapatkan rentang tingkat partisipasi masyarakat adalah :

20 – 100. Sehingga intervalnya dengan rumus sebagai berikut :

Interval = $\frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}$

Jumlah kategori

Interval = $\frac{100 - 20}{5}$

5

= 16

Berdasarkan interval diatas ditetapkan tingkatan partisipasi sebagai berikut :

- Skor 20 – 36 = tingkat partisipasi sangat rendah

- Skor 37 – 52 = tingkat partisipasi rendah
- Skor 53 – 68 = tingkat partisipasi sedang
- Skor 69 - 84 = tingkat partisipasi tinggi

Skor 85 - 100 = tingkat partisipasi sangat tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Hasil penelitian di wilayah perhutanan sosial wilayah KPHP KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun diperoleh informasi bahwa masyarakat di wilayah tersebut berpartisipasi dalam perhutanan sosial, diantaranya berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi (Tabel 1).

Tabel 1 Deskripsi Tingkat Partisipasi Berdasarkan indikator

Indikator	Rerata Skor	Kategori	Sub indikator	Rerata Skor	Kategori
Perencanaan	3.51	Partisipasi	1	3.2651	Cukup Partisipasi
			2	3.3133	Cukup Partisipasi
			3	3.5301	Partisipasi
			4	3.6145	Partisipasi
			5	3.8072	Partisipasi
Perlindungan	3.54	Partisipasi	1	3.3614	Cukup Partisipasi
			2	3.6265	Partisipasi
			3	3.7470	Partisipasi
			4	3.5301	Partisipasi
			5	3.5301	Partisipasi
			6	3.5060	Partisipasi
			7	3.4819	Partisipasi
Pemanfaatan	3.55	Partisipasi	1	3.2169	Cukup Partisipasi
			2	3.5904	Partisipasi
			3	3.6386	Partisipasi
			4	3.6627	Partisipasi
			5	3.6265	Partisipasi
Evaluasi	3.50	Partisipasi	1	3.5060	Partisipasi
			2	3.6747	Partisipasi
			3	3.3133	Cukup Partisipasi
Total				3.51	Partisipasi

Ket : Sangat Partisipasi = 4,21 – 5,00

Partisipasi = 3,41 - 4,20

Cukup Partisipasi = 2,61 – 3,40

Tidak partisipasi = 1,81 - 2,60

Sangat Tidak partisipasi = 1,00 - 1,80

1. Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada tabel 1 menunjukkan bahwa masyarakat yang bermukim di wilayah KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun cukup berpartisipasi mengikuti kegiatan rapat atau pertemuan tentang rencana pembentukan kelompok Tani Hutan dan penyusunan rencana kerja tahunan. Masyarakat di wilayah tersebut juga tergolong berpartisipasi dalam kegiatan rapat tentang rencana pelaksanaan penandaan batas areal kelola, rencana patroli dan penandaan batas areal Perhutanan sosial.

2. Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan perlindungan

Masyarakat di wilayah KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun tidak hanya aktif mengikuti perencanaan yang dilakukan oleh pihak KPHP melainkan juga mereka aktif dalam perlindungan hutan diantaranya pemeliharaan tanaman, perbaikan fasilitas umum di areal Perhutanan Sosial, pembersihan lahan tanpa membakar, keikutsertaan patroli, ikut serta menanam dan memelihara bibit tanaman dari kegiatan dan program instansi Kehutanan dan ikut aktif dalam pemadaman kebakaran hutan. Sedangkan kegiatan penanaman di Perhutanan sosial masih tergolong belum memuaskan atau mereka hanya kategori cukup aktif.

3. Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan pemanfaatan

Program Perhutanan sosial di wilayah KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun telah mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar yang ditandai dengan mereka ikut aktif dalam pemanfaatan hasil hutan dari program perhutanan sosial tersebut. Masyarakat di wilayah tersebut selalu menggunakan dokumen resmi (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Nota Angkutan) dalam menjual hasil panen, membayar pajak hasil panen, selalu ikut serta dalam pengolahan dan penjualan hasil HHBK. Walaupun masyarakat mendapatkan manfaat dari perhutanan sosial tetapi dalam hal kegiatan pemanenan hasil tanaman di areal Perhutanan Sosial masih tergolong cukup atau cukup berpartisipasi.

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan menggunakan dokumen resmi dalam penjualan hasil hutan non kayu mengindikasikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat dari kegiatan perhutanan sosial dan hasil yang mereka peroleh telah dirasakan cukup oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengolahan dan penjualan hasil panen mengindikasikan telah terjalin kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah yang ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat menggunakan dokumen resmi dalam penjualan hasil hutan.

4. Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan evaluasi

Masyarakat di wilayah KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun aktif melakukan kegiatan evaluasi program perhutanan sosial diantaranya ikut serta kegiatan tim monitoring dengan pemerintah dan ikut serta dalam pengumpulan data luas lahan, perkembangan persemaian, penanaman, dan volume hasil panen. Hal yang masih dianggap kurang dari kegiatan perhutanan sosial di wilayah ini adalah masih kurang aktifnya masyarakat dalam kegiatan pelatihan dan sosialisasi.

Secara keseluruhan responden berpartisipasi dalam kegiatan perhutanan sosial tetapi pengamatan secara individual menunjukkan jumlah responden yang berpartisipasi dan sangat berpartisipasi dalam perhutanan sosial hanya sebesar 57,83% (31.33%+26.51%). Dalam penelitian ini ditemukan responden yang sangat tidak berpartisipasi dalam perhutanan sosial yaitu sebanyak 2 responden (2,41%) (Tabel 4.11).

Tingkat partisipasi yang diperoleh dalam penelitian ini mempunyai nilai yang hamper sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, *et.al*, (2014). Bahwa tingkat partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumberdaya hutan adalah sebesar 53%, rendahnya partisipasi tersebut bukan hanya disebabkan karena ketidakpedulian terhadap hutan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor umur, ppendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengalaman, intensitas penyuluhan, persepsi, motivasi dan intesnsif.

Tabel 2 Distribusi Responden berdasarkan tingkat partisipasi

Kategori	Perencanaan		Perlindungan		Pemanfaatan		Evaluasi		Partisipasi	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sangat Rendah	5	6.02	5	6.02	6	7.23	3	3.61	2	2.41
Rendah	9	10.84	15	18.07	14	16.87	12	14.46	14	16.87
Cukup	25	30.12	14	16.87	7	8.43	19	22.89	19	22.89
Tinggi	30	36.14	22	26.51	35	42.17	24	28.92	26	31.33
Sangat Tinggi	14	16.87	27	32.53	21	25.30	25	30.12	22	26.51
Jumlah	83	100	83	100	83	100	83	100	83	100

KESIMPULAN

Masyarakat yang tinggal di kawasan perhutanan sosial berpartisipasi dalam program perhutanan sosial dengan semua tahapan diantaranya berpartisipasi dalam proses perencanaan, perlindungan, pemanfaatan dan evaluasi. Tingkat partisipasi masyarakat yang paling tinggi yaitu pada kegiatan pemanfaatan sedangkan tingkat partisipasi yang paling rendah adalah pada kegiatan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, O. M. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung : Alfabeta.
- Apipoonyanon, John, Kuwornu, Szabo dan Shrestha (2019) Factors Influencing Household Participation in Community Forest Management : Evidence From Udon Thani Province, Thailand, Journal of Sustainable Forestry, June 2019

- Asep.,Yunan., Firdaus. (2018). Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial.Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Bahruzin. 2014. Analisis Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di KPH Bandung Utara Jawa Barat. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. Tesis.
- Cohen dan Uphoff. (1977). Rural Development: Concept and Measures for project Design, Implementation, and Evaluation. New York: Cornel
- Conyers, D. (1991). Perencanaan sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: UGM Pres.
- Damayantanti, P. T. (2011). Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Jurnal Komunitas. Vol. 3 No. 1, Maret 2011 : 70-82.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan ke delapan belas Edisi IV. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dipokusumo, B. (2011). Model Partisipatif Perhutanan Sosial Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Kasus Pembangunan Hutan Kemasyarakatan pada Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok). Disertasi. Bogor : IPB Press.
- Ekawati, S. Suharti, S dan Anwar, S (2020). Bersama Membangun Perhutanan Sosial, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan Perubahan Iklim, PT. Penerbit IPB Press, Bogor
- Ghozali, Imam. (2011). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gunawan, H., & Afriyanti, D. (2019). Potensi Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut. Jurnal Ilmu Kehutanan, 13(2), 227. <https://doi.org/10.22146/jik.52442>
- Inoue, (1998). Characteristics of Participatory Forest Management System in Southeast Asian Countries. Part of Earlier Paper. Laboratory of Forest Policy, the University of Tokyo, Japan Institute For Global Environment Strategies, Japan.
- Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Putro, H. R. (2011). Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Jakarta: Debut Wahana Sinerg
- Leo Agustino, 2006, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta
- Lestari,T., Agussabti,. Alibasyah, M,R (2014), Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Konservasi Sumberdaya Hutan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan Voleme 3 No. 2 Oktober 2014
- Liani M,F., Roslinda, E., Muin, S (2015), Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Adat di Dusun Sungai Utik Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, Jurnal Hutan Lestari Tahun 2015 Vol. 4.
- Mardikanto, T. (2006). Prosedur Penelitian untuk Kegiatan Penyuluhan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Prima Theresia Pressindo. Surakarta.
- Mitchell B., Setiawan, B., & Rahmi, D.H. (2003). Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

- Mulyadi, M. (2013).Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Kehutanan (Studi Kasus Komunitas Battang di Kota Palopo, Sulawesi Selatan Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 4 . 2013
- Nanang, M. dan G. S. Devung (2004). Panduan Pengembangan Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan. Kanagawa : Institute for Global Environmental Strategies.
- Nisa, H., Golar., Arianingsih, I (2019), Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Produksi di Desa Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, *J.ForestSains* 16 Juni 2019
- Nurbaiti, S. R. dan A. N. Bambang. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). *Proceeding Biology Education Conference* Vol. 14 (1) : 224-228, Oktober 2017.
- Nurrochmat. (2016). Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan (Teori dan Implementasi). *IPB Press* 2016.
- Purnomo, B. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit VII-Hulu Sarolangun Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Lestari (Studi Kasus Desa Sungai Bemban, Kecamatan Batangasai dan Desa Temalang, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun). Tesis. Semarang : Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.
- Ritchie, C. Mc., Dougall., Mandy., Higgith., Nicolette, B., dan De Olivera. 2001. Kriteria dan Indikator Kelestarian Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat. Centre for International Forestry Research (CIFOR). Jakarta
- Ruhimat. (2010). Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar . *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 7 no.3
- Ross, Murray G, dan Lapping B.W. (1967). *Community Organization: Theory, Principles and Practice*. New York: Harper & Row Publisher.
- Savari, M., Damaneh Hamed, E., Damaneh Hadi,. S (2020), Faktors Influencing Local People's Participation in Sustainable Forest Management, *Arabian Journal of Geosciences* 2020. <https://doi.org/10.1007/s12517-020-05519-z>
- Simon Hasanu. (1999). *Pengelolaan hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management)* . Yogyakarta, *Bigraf Publishing*
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sukadji, Soetarlinah. (2000). *Menyusun dan Mengevaluasi Laporan Penelitian*. Jakarta: UI-Press
- Suparwata, D. O. (2018). Pandangan Masyarakat Pinggiran Hutan Terhadap Program Pengembangan Agroforestri. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 15 No.1, 2018 : 47-62
- Tjiptono, Fandy dan Chandra, Gregorius. (2011). *Service, Quality & Satisfaction*. Edisi 3. Yogyakarta:

- Wahyuni Y.T dan Manaf Asnawi, (2016), Partisipasi Masyarakat Dalam Keberlanjutan Program Gerak Bersemi di Griya Prima Lestari Munthe Kabupaten Kutai Timur, Biro penerbit planologi Undip, Vol. 12 No.4.472 – 482.
- Winata, A., dan Yuliana, E (2012), Tingkat Partisipasi Petani Hutan Dalam Program Pengembangan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani, MIMBAR Vol. XXVIII No.1 Juni 2012
- World Bank. (2014), *Towards Indonesian Land Reforms: Challenges and Opportunities. a Review of the Land Sector (Forest and Non-Forest) in Indonesia*. Jakarta : World Bank.
- Zeilika, E., Kaskoyo, H., Wulandari, C (2021), The Effect Of Participation In Community Forest Management On The Welfare Of Farmers (Case Study At Mandiri Lestari Forest Farmers Community, In KPH VIII Batu Tegi. Jurnal Hutan Tropis Vol. 9